
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team.....	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page.....	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content.....	6

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

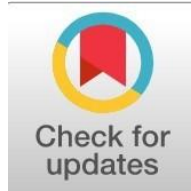
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

The Role of Local Budget Transparency in Community Participation in Tanjungpinang: Peran Transparansi Anggaran Daerah terhadap Partisipasi Masyarakat di Tanjungpinang

Aisyah Ainayatul Hikmah, 2405040203@student.umrah.ac.id (1)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Putri Maharani Aisyah, 2405040022@student.umrah.ac.id ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Selvi Ega Sari, 2405040024@student.umrah.ac.id ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

Background: Transparency in regional budgeting serves as an essential foundation for accountable governance and encourages public involvement in financial oversight. **Specific background:** In Tanjungpinang, the regional government has provided budget information through digital platforms to support public access to planning and expenditure documents. **Knowledge gap:** Despite the availability of this information, community participation is not yet optimal due to varied levels of fiscal literacy, limited technological access, and insufficient outreach. **Aims:** This study examines how regional budget transparency is implemented in Tanjungpinang and how accessible budget information corresponds with community participation. **Results:** The findings show that while budget documents are available online, public use remains limited. Low financial understanding, irregular data updates, and digital access barriers reduce community involvement, with higher participation found among groups with stronger digital access and education. **Novelty:** This research offers contextual evidence from a region with diverse literacy levels, illustrating that transparency alone does not ensure active participation. **Implications:** Strengthened public outreach, clearer information presentation, and improved fiscal literacy are essential to support more inclusive community participation in regional budgeting.

Highlights:

- Public use of regional budget information in Tanjungpinang remains limited.
- Fiscal literacy and digital accessibility shape levels of community participation.
- Enhanced outreach and clearer information delivery support broader public involvement.

Keywords: Budget, Region, Transparency, Community, Participation

Published date: 2025-12-12

Pendahuluan

Peran transparansi anggaran daerah di Tanjungpinang sangat terkait dengan strategi peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Transparansi anggaran menjadi elemen utama dalam membangun rasa percaya antara pemerintah dan warga masyarakat. Melalui keterbukaan data anggaran, masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta

pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga mereka dapat mengevaluasi performa pemerintah dan mengurangi risiko korupsi, kolusi, serta nepotisme. Di Tanjungpinang, pemerintah telah memperkuat transparansi dengan memanfaatkan platform digital dan prinsip keterbukaan informasi public, seperti publikasi berkala dokumen anggaran dan laporan keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala, di antaranya tingkat pemahaman keuangan masyarakat yang masih rendah, pemanfaatan data yang belum optimal, serta pengaruh dari kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan warga. Pengaruh transparansi anggaran terhadap keterlibatan masyarakat terbilang cukup besar. Semakin luas akses informasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah, semakin tinggi tingkat partisipasi warga dalam memantau keuangan daerah. Tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh ekspektasi dan motivasi masyarakat, tingkat kesadaran individu, serta bantuan dari pemerintah. Akan tetapi, rintangan terbesar muncul dari beban pekerjaan, situasi ekonomi, dan pendidikan yang minim. Agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan diperlukan kebijakan yang merangkul semua kalangan, program pendidikan literasi keuangan, serta fasilitas partisipasi yang sederhana dan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat [mustika].

Beberapa studi sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh [1],[2], mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi anggaran berhubungan positif dengan meningkatnya akuntabilitas serta keterlibatan masyarakat. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada wilayah perkotaan besar dengan tingkat literasi public yang relative tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan menitikberatkan pada kondisi di Tanjungpinang, di transparansi anggaran melalui platform digital.

Celah penelitian (research gap) yang diangkat dalam studi ini adalah belum optimalnya pemanfaatan informasi anggaran oleh masyarakat akibat keterbatasan literasi dan akses partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana transparansi anggaran daerah di Tanjungpinang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, kebaruan penelitian (novelty) ini terletak pada fokus analisis di wilayah dengan tingkat literasi publik yang beragam serta pada penekanan integrasi antara transparansi digital dan partisipasi masyarakat lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat konsep good governance melalui peningkatan efektivitas transparansi anggaran dan partisipasi publik di tingkat daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mixed methods) yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipakai untuk mengulas teori serta pemikiran yang berkaitan dengan transparansi anggaran daerah dan partisipasi masyarakat [1]. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk membaca data-data numerik dari laporan resmi, seperti APBD, hasil audit, maupun data yang dipublikasikan pemerintah [3].

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi literatur, dengan menelaah buku, jurnal, artikel, serta dokumen yang relevan. Data yang ada kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan,

menghubungkan, dan menarik makna dari teori serta data yang sudah terkumpul. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran transparansi anggaran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat [4].

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi literature dan dokumen resmi pemerintah, dengan menelaah buku, jurnal, artikel ilmiah, serta laporan keuangan daerah yang relevan. Data primer juga diperoleh melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat, guna memperkaya pemahaman terhadap konteks penerapan transparansi anggaran di Tanjungpinang [5]. Integrasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara sekuensial (sequential explanatory design), di mana analisis kuantitatif terhadap data keuangan dan indikator partisipasi masyarakat dilakukan terlebih dahulu, kemudian hasilnya diperdalam melalui analisis kualitatif untuk memahami faktor-faktor social dan kebijakan yang memengaruhi hubungan tersebut [6]. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengukur tingkat transparansi dan partisipasi berdasarkan indikator tertentu, serta analisis isi (content analysis) untuk menelaah tema dan pola dari dokumen maupun hasil wawancara [3]. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan empiris mengenai peran transparansi anggaran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Tanjungpinang.

Hasil dan Pembahasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Untuk mendapatkan dana tersebut, pemerintah daerah harus menyusun terlebih dahulu dan meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya setelah DPRD menyetujui, barulah anggaran dapat digunakan. APBD sebagai suatu perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah memang harus melalui proses transparan partisipatif. Setelah APBD disusun dan disetujui oleh DPRD, pemerintah daerah di Tanjungpinang sangat berperan penting dalam menjalankan dan mengelola anggaran tersebut secara efisiensi dan akuntabel untuk pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat. Pemerintah Tanjungpinang harus benar-benar memastikan anggaran tersebut digunakan dan dialokasikan sesuai kebutuhan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sektor ekonomi masyarakat.

1. Peran Transparansi Anggaran Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi dan Akuntabilitas di Tanjungpinang

Transparansi anggaran publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan cita-cita tata kelola fiskal yang akuntabel dan partisipatif. Di Kota Tanjungpinang, komitmen terhadap keterbukaan informasi ini memiliki peran multidimensi, mulai dari menumbuhkan kesadaran warga hingga mengamankan efisiensi keuangan daerah. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat tidak sekedar menerima

informasi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memahami, mengevaluasi, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan public. Penyajian data anggaran yang terbuka dan mudah diakses memberi ruang bagi warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Karena itu, transparansi menjadi landasan utama yang penting dalam membangun ekosistem partisipasi di tingkat local.

a. Transparansi sebagai Pendorong Partisipasi Masyarakat

Transparansi berperan sebagai faktor penting yang mendorong keterlibatan public. Dengan menyediakan akses terhadap berbagai dokumen anggaran, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta ringkasan APBD, pemerintah memberikan masyarakat kekuatan melalui informasi. Transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administrative, tetapi juga merupakan langkah konkret menuju praktik pemerintah yang lebih demokratis. Di Tanjungpinang, tersedianya informasi yang cukup, termasuk melalui platform digital, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk

- 1) Melakukan pengawasan berbasis pengetahuan: yaitu warga dapat menelaah, menganalisis dan membandingkan antara rencana anggaran yang dipublikasi dengan realisasi di lapangan.
- 2) Memperkuat kontrol sosial: yaitu, dengan adanya pengawasan digital dan partisipasi warga, potensi terjadinya praktik penyimpangan dapat diminimalisir. Transparansi mendorong warga untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek pengawas. Peningkatan partisipasi ini mencerminkan tumbuhnya rasa keterikatan masyarakat terhadap dana publik.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian [7], yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat cenderung meningkat ketika akses terhadap informasi public diperluas melalui media digital. Selain itu, teori partisipasi Arnstein [8] dalam ladder of citizen participation menegaskan bahwa transparansi merupakan syarat awal agar masyarakat dapat bergerak dari tingkat tokenisme menuju kontrol warga. Dengan demikian, hasil penelitian di Tanjungpinang semakin menegaskan keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam membangun partisipasi yang substansial di tingkat local.

b. Transparansi Memperkuat Akuntabilitas Dan Membendung Penyimpangan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Keterbukaan informasi secara langsung mendukung akuntabilitas dalam dua jalur, yaitu:

- 1) Akuntabilitas formal (horizontal): yaitu, kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara tepat waktu kepada lembaga legislatif (DPRD) dan pemerintah pusat. Kualitas laporan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang ketat adalah indikator kepatuhan formal.

- 2) Akuntabilitas publik (vertikal): yaitu, keterbukaan informasi memastikan bahwa pertanggungjawaban tidak terhenti pada birokrasi, tetapi berlanjut pada publik. Transparansi dalam restrukturisasi birokrasi dan pengembangan tata kelola pemerintah yang baik di Tanjungpinang secara khusus menargetkan peningkatan kinerja dan kualitas pertanggungjawaban publik.

Temuan di Tanjungpinang menunjukkan bahwa meningkatnya keterbukaan informasi public berkontribusi pada peningkatan efisiensi dalam pengeluaran daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian [9] yang mengungkap bahwa transparansi fiskal berkaitan positif dengan efisiensi belanja serta menurunkan potensi penyimpangan anggaran di daerah. Selain itu, konsep good governance dari UNDP [10] menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama yang saling menguatkan dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Lebih jauh, transparansi terbukti memberikan pengaruh besar dalam mencegah penyimpangan melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran. Berbagai temuan menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Efisiensi tersebut dapat dicapai berkat adanya pengawasan public yang lebih kuat; ketika anggaran dipublikasikan secara terbuka, pemerintah mendorong untuk memastikan setiap lokasi dana tepat sasaran dan mampu menghasilkan keluaran yang optimal. Dengan demikian, transparansi tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga memastikan setiap rupiah dana publik dihabiskan secara ekonomi, efisien, dan efektif.

2. Kendala Masyarakat dalam Mengakses dan Memahami Informasi Anggaran

Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat, sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga menutup kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan maupun penggelapan dana. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat bisa memantau serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik [11]. Namun, seringkali masyarakat merasa dirinya tidak dapat akses informasi yang mereka butuhkan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu diantaranya:

a. Akses Informasi yang Masih Terbatas

Pemerintah Kota Tanjungpinang tentu memiliki niat baik untuk transparan. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyediakan situs resmi yang dapat diakses oleh publik. Namun, terkadang situs tersebut mengalami kendala sulit untuk diakses. Yang membuat masyarakat merasa informasi anggaran tersebut menjadi kurang transparan secara praktis, meskipun secara legal sudah tersedia. Situs web yang ditujukan untuk keterbukaan informasi publik harus mudah dinavigasi, stabil, dan user friendly. Jika user sering mengalami loading time yang lambat, hal ini secara langsung akan menghambat masyarakat dalam mendapatkan informasi anggaran.

Selain masalah teknis, kendala data di situs resmi pemerintah yang tidak selalu diperbaharui secara rutin juga sering terjadi. Serta, tampilan situs yang kurang sederhana menyebabkan orang tidak terbiasa membaca data keuangan daerah kesulitan untuk memahami susunan informasi dan isi di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan kemudahan akses, kejelasan tampilan, dan kelengkapan informasi yang disajikan di dalam situs.

Kondisi ini serupa dengan temuan [12] yang menyebutkan bahwa efektivitas portal keterbukaan informasi daerah bergantung pada user experience dan keteraturan pembaruan data. Dengan demikian, perbaikan aspek teknis dan desain portal menjadi kunci agar masyarakat dapat lebih aktif mengakses informasi anggaran.

b. Rendahnya Literasi Fiskal dan Ketidaktahuan Akses Informasi

Ketidaktahuan publik mengenai akses informasi yang disediakan pemerintah merupakan tantangan signifikan. Masyarakat seringkali kurang memanfaatkan sarana informasi yang tersedia dari pemerintah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya pengetahuan teknologi. Banyak masyarakat terutama dikalangan kelompok lanjut usia terhambat karena kurangnya kemampuan mereka untuk mengakses dan memahami informasi digital. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi kapasitas individu dalam mencerna konsep-konsep terkait keuangan negara, laporan keuangan, atau proses keuangan public. Akibatnya, individu cenderung tidak memiliki kompetensi atau hak untuk ikut serta berperan dalam pengawasan bahkan tidak menyadari pentingnya peran mereka dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan [4].

Tidak hanya itu, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa urusan keuangan dan laporan anggaran sepenuhnya tanggungjawab pemerintah, bukan bagian dari kepentingan publik. Pola pikir yang seperti inilah yang membuat tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah menjadi rendah.

Selain itu, variasi kemampuan dalam memanfaatkan teknologi turut menciptakan ketimpangan informasi antarwilayah. Masyarakat di pusat kota biasanya lebih mudah memperoleh informasi karena memiliki akses internet yang lebih memadai. Sebaliknya, warga di daerah pinggiran atau wilayah dengan infrastruktur digital terbatas sering mengalami hambatan dalam mengakses informasi yang setara. Akibatnya, distribusi akses terhadap informasi public belum sepenuhnya merata. Temuan ini memperkuat hasil riset [4]) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan literasi fiskal masyarakat berbanding lurus dengan tingkat keterlibatan mereka dalam pengawasan anggaran public. Menurut Teori information asymmetry Stiglitz [13], kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kepercayaan public, yang juga terlihat dalam konteks Tanjungpinang.

c. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah

Ketersediaan platform digital tidak serta merta menjamin transparansi jika masyarakat tidak mengetahui keberadaannya atau cara menggunakannya. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat juga menjadi faktor penting yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi publik dalam memanfaatkan akses informasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Banyak program atau kebijakan yang sebenarnya terbuka untuk publik, namun tidak tersampaikan dengan baik karena minimnya kegiatan penyuluhan, publikasi, maupun kampanye informasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah kerap menyampaikan kebijakan hanya melalui kanal resmi atau situs web, sementara tidak semua warga memiliki kebiasaan maupun kemampuan untuk mengakses media tersebut. Sosialisasi yang dilakukan secara terbatas pada kegiatan tertentu juga menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil yang masih menghadapi kendala jaringan komunikasi dan infrastruktur digital. Ditambah lagi, minimnya upaya pemerintah daerah maupun lembaga terkait dalam menyediakan forum dialog, lokakarya, atau pelatihan mengenai pentingnya transparansi dan partisipasi public semakin memperlebar jurang antara pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, warga tetap berada dalam posisi pasif dan tidak terlibat langsung dalam proses pengawasan maupun pengambilan keputusan, karena pemahaman mereka tentang hak akses informasi masih sangat minim.

Penelitian [14] juga menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi public pemerintah daerah menjadi faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut mendukung teori komunikasi partisipasi Freire [15], yang menekankan perlunya dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran kritis terkait hak-hak public.

3. Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Publik: Antara Realitas dan Formalita

Kepercayaan publik pada pemerintah menjadi faktor utama dalam menjaga kestabilan serta legitimasi suatu pemerintahan. Masyarakat mempercayai bahwa pemerintah akan bertindak dengan benar, memprioritaskan kepentingan umum, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki [16]. Kepercayaan ini terbentuk ketika pemerintah menjalankan tugasnya dengan transparan, jujur, dan penuh tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Namun, di Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggaraan negara cenderung menurun, bahkan ada pandangan yang meragukan keberadaan pemerintah. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh perbedaan antara hasil yang diharapkan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Penyediaan informasi yang jelas, seperti laporan keuangan dan capaian kinerja pemerintah, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan publik.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran memberikan dampak positif yang berarti. Manfaatnya, meliputi mencegah praktik korupsi, memudahkan identifikasi kekurangan maupun kelebihan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih mudah menilai kinerja pemerintah, serta memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai

contoh, Kota Yogyakarta telah menerapkan system e-budgeting yang memungkinkan warga untuk memonitor pengguna anggaran secara langsung. System ini mampu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah kota sekaligus memperkuat kepercayaan public. Melalui system tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi anggarab, memberikan masukan, serta memantau pelaksanaanya, sehingga mendorong partisipasi warga dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Keberhasilan impelemntasi e gudgeting sendiri sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah serta tingkat kepedulian masyarakat.

Selain itu, keterbukaan anggaran juga mendorong warga untuk lebih proaktif dalam mengawasi proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan akses informasi yang cukup, masyarakat dapat memberikan kritik dan saran yang membangun, yang kemudian meningkatkan partisipasi dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa Negara dengan tingkat transparansi anggaran yang tinggi umumnya memiliki tingkat kepercayaan public yang lebih baik. Sebaliknya, ketidaktrasnparanan dalam pengelolaan anggaran dapat mengikis kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori kepercayaan institusional Bouckaert & Van de Walle [17] yang menyatakan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas adalah tereminan utama dalam pembentukan public trust.

Salah satu contoh bahwa transparansi anggaran berdampak positif bagi masyarakat yaitu dari Kota Yogyakarta yang telah menerapkan sistem e-budgeting yang memungkinkan warga memantau penggunaan anggaran secara real time. Keberhasilan contoh konkret ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain khususnya Kota Tanjungpinang untuk mengadopsi sistem yang seruo a guna memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Puspitasari [18] yang menunjukkan bahwa penerapan e-government di daerah dengan partisipasi aktif masyarakat berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan public. Dengan demikian, hasil penelitian di Tanjungpinang memperluas temuan terdahulu dengan menegaskan pentingnya integrasi antara literasi masyarakat dan kebijakan keterbukaan anggaran sebagai factor kunci penguatan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Simpulan

Keterbukaan informasi anggaran, seperti APBD dan laporan realisasi , sangat oenting agar masyarakat bias melihat dan mengawasi bagaimana dana public digunakan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya trasnparansi ini, potensi korupsi dan penyalahgunaan dana bias diminimalisir karena penggunaan anggaran menjadi lebih terbuka dan dipantau oleh public.

Implementasi transparansi anggaran dilakukan dengan menyediakan akses mudah ke dokumen-dokumen anggaran melalui berbagai saluran, terutama media digital dan situs resmi pemerintah daerah. Hal ini memberi kesempatan bagi masyarakat, media, dan lembaga pengawas untuk memperoleh informasi secara langsung dan melakukan pemantauan secara lebih efektif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keterbukaan anggaran berpengaruh langsung terhadap meningkatnya partisipasi public dalam mengawasi

keuangan daerah. Saat warga mendapatkan informasi yang transparan dan mudah dijangka, mereka menjadi lebih terdorong untuk ikut serta dalam forum-forum public, menyampaikan pendapat, serta mengevaluasi kinerja pemerintah.

Namun, di lapangan masih ada beberapa kendala, masih banyak masyarakat yang sulit mengakses informasi ini karena keterbatasan teknologi dan kurangnya sosialisasi pemerintah terkait ketersediaan informasi tersebut. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan public juga masih rendah, sehingga mereka kurang optimal memanfaatkan informasi untuk ikut mengawasi pengelolaan anggaran. Kondisi ini berdampak pada kepercayaan public: semakin rendah kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan informasi anggaran, semakin lemah pula rasa percaya terhadap pemerintah. Sebaliknya, apabila transparansi didukung oleh literasi public yang memadai, tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi agar warga semakin memahami perannya dalam mengawasi pengelolaan anggaran. Melalui tata kelola keuangan yang terbuka dan melibatkan masyarakat, akuntabilitas pemerintah daerah dapat ditingkatkan sehingga mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan keterkaitan tiga aspek utama; (1) transparansi anggaran sebagai fondasi akuntabilitas public; (2) peningkatan partisipasi masyarakat melalui akses informasi yang inklusif; dan (3) penguatan kepercayaan public sebagai hasil dari pentingnya literasi fiscal dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai jembatan antara transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip good governance transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan keadilan pemerintah daerah dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik, sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta masukan ilmiah yang sangat berharga selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta kerja sama dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam memperkuat transparansi anggaran daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Indonesia.

Referensi

- [1] D. Fathirah and H. Haliah Nirwana, "Budget Transparency and Accountability in Local Government," *Asian Journal of Management Analytics*, vol. 3, no. 4, pp. 1171–1184, 2024.

- [2] R. Fajri and J. Julita, “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman,” *Al-Iqtisād: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.
- [3] I. Jamaluddin, A. Patria, Z. Yahya, and T. Jahidin, “Analisis Partisipasi Anggaran dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan pada BPKD Kabupaten Bireuen,” *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting*, vol. 3, no. 2, 2022.
- [4] R. I. Saputra, A. K. S. Putra, S. Ahyar, B. Saputra, and Universitas Maritim Raja Ali Haji, “Pengaruh Transparansi Anggaran Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Keuangan Negara,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, vol. 10, no. 5, pp. 51–60, 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/10089>
- [5] N. Hafifa, V. Erlisya, and P. N. Umaira, “Analisis Transparansi Keuangan Publik Di Era Digital: Studi Kasus KPPN Tanjungpinang,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 3, no. 1, pp. 557–561, 2025.
- [6] A. W. Pradana, “Promoting Participatory Budgeting Practices in Indonesia: Lessons from Malang City,” *Policy & Governance Review*, vol. 6, no. 3, pp. 297–313, 2022.
- [7] Y. Arodhiskara, J. Jumriani, Y. Tarawiru, F. Ladung, and M. Azizurrohman, “Assessing the interaction of transparency and digital infrastructure on provincial budget performance in Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, vol. 26, no. 2, 2025.
- [8] S. R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” *Journal of the American Institute of Planners*, vol. 35, no. 4, pp. 216–224, 1969.
- [9] M. Mustika, W. Afdillah, R. Sartika, and W. Pangestoeti, “Transparansi Anggaran Publik Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, vol. 2, no. 4, pp. 1245–1250, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/article/view/2881>
- [10] United Nations Development Programme (UNDP), *Corruption and good governance*, New York: Management Development and Governance Division / Bureau for Policy and Programme Support, 1997.
- [11] B. Arianto and Nazaki, “Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Tanjungpinang,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, no. 2, 2017.
- [12] Y. Arodhiskara, J. Jumriani, F. Ladung, and M. Azizurrohman, “Assessing the interaction of transparency and digital infrastructure on provincial budget performance in Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, vol. 26, no. 2, 2025.
- [13] J. E. Stiglitz, “Information and the Change in the Paradigm in Economics,” *American Economic Review*, vol. 92, no. 3, pp. 460–501, 2002.
- [14] K. Karimah, L. S. Kamila, I. Pramudhita, and E. Purwanto, “Pengaruh Komunikasi Pemerintah Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 6, no. 6, pp. 111–120, 2024, doi: 10.6578/triwikrama.v6i6.9466.
- [15] P. Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, Continuum, 1970.

- [16] M. Hamzah et al., “Pengaruh Transparansi Anggaran Daerah terhadap Tingkat Kepercayaan Publik,” *Journal Of Islamic Economic Business*, vol. 5, no. 2, 2024.
- [17] G. Bouckaert and S. Van de Walle, “Public service performance and trust in government: the problem of causality,” *International Journal of Public Administration*, vol. 29, no. 8–9, pp. 891–913, 2003.
- [18] P. A. Maulan and N. Fitriani, “E Government and Public Trust: Examining the Impact of Digital Transparency on Citizen Engagement in Southeast Asia,” *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, vol. 5, no. 1, pp. 242–252, 2025, doi: 10.51903/shqos821.